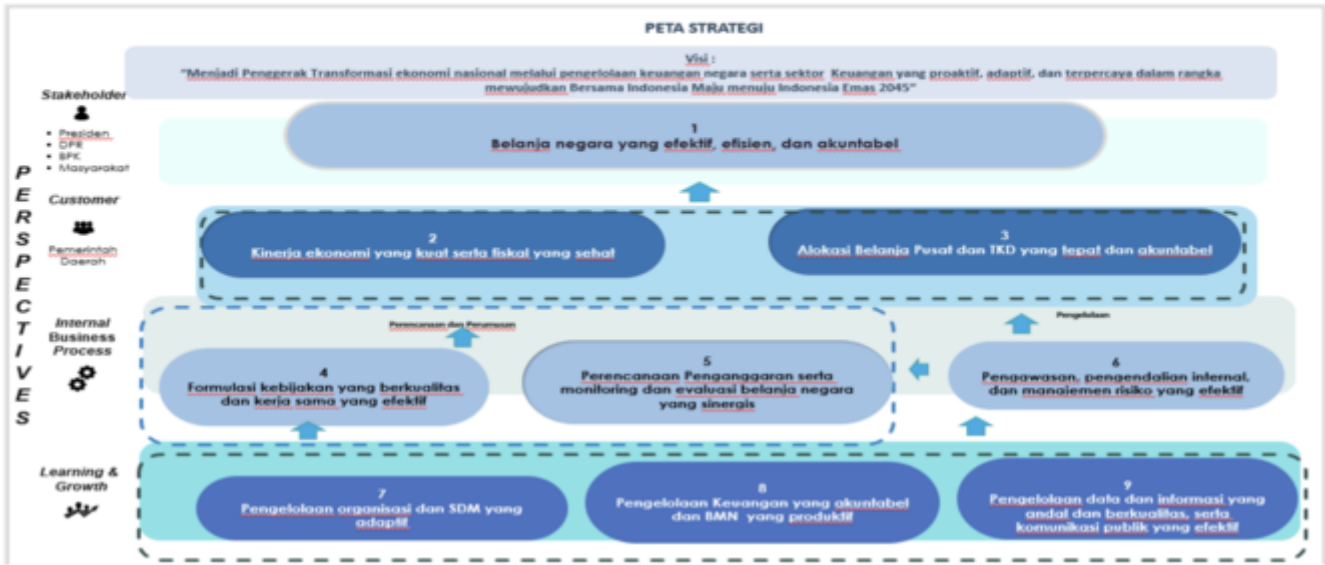




PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-4/PK/2025
DIREKTUR DANA DESA, INSENTIF, OTONOMI KHUSUS, DAN
KEISTIMEWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

- Dalam melaksanakan Tugas Sebagai Direktur Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan, Saya akan:
- 1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja ini.
 - 2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
 - 3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
DIREKTUR DANA DESA, INSENTIF, OTONOMI KHUSUS, DAN
KEISTIMEWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel	1a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	92.2
		1b-CP	Indeks integritas	100
		1c-N	Indeks Kualitas Kepuasan Publik atas Layanan DDIOKK	3.5
2	Kinerja Ekonomi yang kuat serta Fiskal yang sehat	2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100
3	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel	3a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%
		3b-CP	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	29.5%
		3c-CP	Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas	4a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5
5	Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis	5a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%
		5b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%
6	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	6a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	7a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%
8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	8a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%
9	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif	9a-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100
		9b-N	Persentase Implementasi Penyampaian Data Keuangan Desa secara Elektronik	35%

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

a. Program Belanja Negara Rp5,372,822,000

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Rp3,809,150,000

2. Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD Rp663,840,000



3. Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	Rp899,832,000
Program:	
b. Program Kebijakan Fiskal	Rp930,644,000
Kegiatan	
1. Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp930,644,000

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan



Ditandatangani Secara Elektronik
Luky Alfirman



Ditandatangani Secara Elektronik
Jaka Sucipta



RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR DANA DESA, INSENTIF, OTONOMI KHUSUS, DAN
KEISTIMEWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel							
1a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	48.6	51.7	51.7	63	63	92.2	92.2
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1c-N	Indeks Kualitas Kepuasan Publik atas Layanan DDIOKK	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
2	Kinerja Ekonomi yang kuat serta Fiskal yang sehat							
2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	100	100	100	100	100	100
3	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel							
3a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%
3b-CP	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	3.14%	9.16%	9.16%	16.89%	16.89%	29.5%	29.5%
3c-CP	Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80	80	80	80	80	80	80
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas							
4a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
5	Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis							
5a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif							
6a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	80	80	80	80	80	100	100
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
7a-CP	Persentase Implementasi IS	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	RBTK dan Data Analytics Unit							
8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel							
8a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%
9	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif							
9a-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
9b-N	Persentase Implementasi Penyampaian Data Keuangan Desa secara Elektronik	5%	15%	15%	25%	25%	35%	35%

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan



Ditandatangani Secara Elektronik
Jaka Sucipta



INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR DANA DESA, INSENTIF, OTONOMI KHUSUS, DAN KEISTIMEWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			
1	Kinerja Ekonomi yang kuat serta Fiskal yang sehat	Pengembangan Indeks Regional Wellbeing Indicator	1. a. Kebijakan Pembangunan Daerah yang Lebih Tepat Sasaran	Januari - Desember	Pengembangan Framework dan Indikator Regional Wellbeing Index	Pengembangan Indikator Regional Wellbeing	Q1 - Q4	1. Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	176,000,000
			2. b. Efektivitas dan Efisiensi Pengalokasian Anggaran Daerah 3. c. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Daerah 4. d. Peningkatan Kualitas Kebijakan Sosial dan Ekonomi Daerah	Januari - Desember	Pembangunan Dashboard Pemantauan Perkembangan Kesejahteraan Regional	Dashboard Pemantauan Perkembangan Kesejahteraan Regional.			

			5. e. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan



Ditandatangani Secara Elektronik
Jaka Sucipta



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Jaka Sucipta		NAMA	Luky Alfirman
NIP	19710201 199703 1 001		NIP	19700327 199503 1 002
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan		JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
UNIT KERJA	Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks efektivitas belanja dan investasi	92.2	Penerima Layanan
		Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Indeks Kualitas Kepuasan Publik atas Layanan DDIOKK	3.5	Penerima Layanan
2	Kinerja Ekonomi yang kuat serta Fiskal yang sehat	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	Penerima Layanan
3	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%	Penerima Layanan
		Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	29.5%	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas alokasi TKD untuk	80	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



		infrastruktur		
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	Proses Bisnis
5	Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	Proses Bisnis
		Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	Proses Bisnis
6	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100	Proses Bisnis
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	Penguatan Internal atau Anggaran
9	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Implementasi Penyampaian Data Keuangan Desa secara Elektronik	35%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA		
	- Melakukan perbaikan tiada henti	Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA		
	sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.



Jakarta, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Luky Alfirman

19700327 199503 1 002

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Jaka Sucipta

19710201 199703 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	63 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	48.6	51.7	51.7	63	63	92.2	92.2
	1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
	1c-N	Indeks Kualitas Kepuasan Publik atas Layanan DDIOKK	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	100	100	100	100	100	100
	3a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%
	3b-CP	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	3.14%	9.16%	9.16%	16.89%	16.89%	29.5%	29.5%
	3c-CP	Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80	80	80	80	80	80	80

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



	4a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
	5a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	80	80	80	80	80	100	100
	7a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
	8a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%
	9a-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
	9b-N	Persentase Implementasi Penyampaian Data Keuangan Desa secara Elektronik	5%	15%	15%	25%	25%	35%	35%
KONSEKUENSI									
	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								
	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								



Jakarta, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Luky Alfirman

19700327 199503 1 002

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Jaka Sucipta

19710201 199703 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025

